Oleh: Hendra Kurniawan, M.Pd.
Dosen Pendidikan Sejarah
Universitas Sanata Dharma

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Mei 1998

Kekerasan entah fisik maupun verbal (termasuk seksual) terhadap perempuan masih sering terjadi. Pemberitaan dan berbagai diskursus tentangnya pun santer terdengar. Berangkat dari situ, ingatan melayang pada tragedi Mei 1998 yang tahun ini diperingati 24 tahun. Tragedi kemanusiaan ini juga menyimpan luka bagi perempuan. Kasus kekerasan terhadap perempuan dalam tragedi Mei 1998 masih belum diungkap secara utuh. Seiring dengan tekad pemerintah yang menaruh perhatian serius pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka tragedi Mei 1998 juga perlu dituntaskan.

Tragedi ini masih menyimpan banyak hal yang tersembunyi dan belum diungkap ke publik. Mei 1998 menjadi catatan kelam sejarah bangsa ini yang harus diterima dengan berani dan terbuka. Jangan sampai justru muncul upaya-upaya kolektif untuk melupakan sisi-sisi gelap itu. Perbuatan menyangkal dan melupakannya secara sengaja tidak akan membuat bangsa ini menjadi berbudi luhur dan berintegritas. Justru lembaran-lembaran hitam dalam sejarah bangsa ini harus dihadapi.

Nelson Mandela menerapkan prinsip *forgiven but not forgotten* terhadap praktik apartheid yang pernah menimpa bangsanya. Kiranya dalam konteks ini pula peristiwa Mei 1998 harus ditempatkan. Maaf dan rekonsiliasi diperlukan untuk kemudian bersama membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Akan tetapi belajar dari sejarah, tragedi kemanusiaan ini jangan lantas dilupakan begitu saja.

Ontran-ontran jelang lengsernya Presiden Suharto tanggal 21 Mei 1998 masih menyisakan kepedihan. Terutama bagi mereka yang menjadi sasaran pengalihan amuk massa yang terjadi siang malam antara tanggal 12-16 Mei 1998. Selain kerugian ekonomi yang harus ditanggung akibat penjarahan dan perusakan, kekerasan fisik termasuk juga kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi pada masa-masa itu.

Sayangnya dalam hiruk-pikuk politik seiring tuntutan agar penguasa Orde Baru mundur, kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama kerusuhan Mei 1998 luput dari pemberitaan media. Meskipun saat itu bukti-bukti yang ada cukup kuat, namun hukum memilih bungkam. Tuntutan keadilan bagi korban kerusuhan Mei 1998, termasuk korban kekerasan terhadap perempuan, pada akhirnya disuarakan pula oleh para aktivis sosial.

Kala itu masyarakat Tionghoa menjadi *collective scapegoating*, namun masalah kekerasan seksual yang terjadi pada medio Mei 1998 ternyata juga dialami oleh perempuan non-Tionghoa. Terbatasnya liputan dan sorotan media memunculkan keraguan dari beberapa pihak saat isu kekerasan seksual ini diangkat. Apalagi isu ini sangat sensitif karena tidak lepas dari nuansa politis. Cerita-cerita yang beredar memang tampak sulit dipercaya, namun sesungguhnya perkosaan dan kekerasan seksual itu benar-benar terjadi.

Pemerintahan Presiden BJ Habibie pernah mengeluarkan pernyataan yang mengutuk aksi kekerasan tersebut. Akan tetapi para pelaku termasuk penggerak aksi-aksi yang diduga sistematis ini belum terungkap. Kesulitan datang dari para korban yang sampai saat ini tidak bersedia membuka pengalaman pahitnya. Selain karena malu dan mengalami trauma, tak menutup kemungkinan mereka mendapat ancaman dari pihak-pihak tertentu. Korban memilih menyimpan rapat-rapat dan melupakan kemalangan yang pernah menimpanya.

Beberapa saksi mata yang menyaksikan peristiwa itu juga memilih tutup mulut. Mereka memiliki alasan yang kuat untuk tidak menceritakan pengalaman yang dilihatnya itu. *Pertama*, mereka mengalami trauma sehingga enggan mengingat pengalaman kelamnya. *Kedua*, siapa saja yang sempat berbicara soal ini mendapat ancaman bahkan serangan fisik. Ketika peristiwa terjadi, para saksi mata juga tak kuasa untuk memberi pertolongan. Jumlah pelaku yang banyak dan brutal menciutkan nyali mereka yang bermaksud menolong korban.

Herannya seakan dulu menjadi tumbal Reformasi, justru pada masa sekarang kasus kekerasan terhadap perempuan semakin marak. Padahal sebagai respon atas kasus kekerasan terhadap perempuan dalam tragedi Mei 1998, dibentuklah Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Kasus tahun 1998 belum rampung, Komnas Perempuan malahan kebanjiran persoalan yang semakin berat. Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (Catahu) menulis angka kasus kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat setiap tahunnya.

Kondisi ini mengisyaratkan bahwa hukuman yang berat mendesak diberlakukan untuk para pelaku kekerasan terhadap perempuan. Selain itu diperlukan pula dukungan moral dan upaya pemulihan (*trauma healing*) terhadap para korban. Terkecuali mereka yang sampai kehilangan nyawa, para korban kekerasan membutuhkan bantuan untuk menata kembali masa depannya. Mereka tentu ingin melepas beban kelam masa lalu untuk kemudian diterima dengan tangan terbuka oleh lingkungan sekitar sebagai individu yang seutuhnya.